



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

*Jl. Mayjend Soetoyo No.10, RT.4/RW.14, Cililitan, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12940*

Telepon : (021) 8091908 – 8002192 Faksimili : (021) 8002265 – 8011753

Laman : <https://www.bphn.go.id> Email : humas@bphn.go.id

Nomor : PHN.3-KP.10.02-218 03 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Pengusulan Nama Calon Pengurus Organisasi Profesi
Jabatan Fungsional Analis Hukum

Yth.

Sekretaris/Kepala Biro/Kepala Kantor Wilayah di Kementerian Hukum dan HAM
Kepala Biro Hukum Kementerian/Lembaga
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum
(daftar terlampir)

Di

tempat

Dalam rangka penguatan peran dan fungsi para Analis Hukum di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum maka perlu dibentuk wadah organisasi profesi bagi para Analis Hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk dapat mengusulkan sejumlah 1 atau 2 orang Pejabat Fungsional Analis Hukum yang berkompeten di Instansi Bapak/Ibu untuk menjadi calon pengurus pada organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum tersebut, yang akan di seleksi oleh Instansi Pembina.

Usulan nama sebagaimana dimaksud diajukan melalui laman berikut <https://bit.ly/USULPENGURUSOP>, sampai dengan tanggal 14 Juli 2024. Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Annida (087711052708) dan Sdri. Ria (081299078343).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Ichwan, S.H., M.H.

NIP.196506111985031001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Lampiran Surat
Nomor : PHN.3-KP.10.02-218
Tanggal : 03 Juli 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Kementerian Hukum dan HAM

1. Inspektorat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
6. Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM;
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
10. Biro Perencanaan;
11. Biro Humas, Hukum dan Kerjasama;
12. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh;
13. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara;
14. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat;
15. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau;
16. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan;
17. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi;
18. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung;
19. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bengkulu;
20. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung ;
21. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta;
22. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten;
23. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah;
24. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Timur;
26. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur;
27. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat;
28. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan;
29. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali;
31. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara;
32. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara;

33. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo;
35. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat;
36. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
37. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Maluku.

Kementerian dan Lembaga

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM;
5. Kementerian Koperasi dan UKM;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kementerian Kesehatan;
9. Kementerian Sosial;
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Kementerian Agama;
12. Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Kementerian Sekretariat Negara;
16. Kementerian BUMN;
17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Kementerian Perhubungan;
19. Kementerian Dalam Negeri;
20. Kementerian Ketenagakerjaan;
21. Kementerian Pertanian;
22. Kementerian Perindustrian;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
25. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Kementerian Pertahanan;
27. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
28. Kejaksaan Republik Indonesia;
29. Komisi Yudisial;
30. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
31. Badan Keamanan Laut;

32. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
33. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
34. Komisi Pemilihan Umum;
35. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
36. Badan Pemeriksa Keuangan;
37. Ombudsman RI;
38. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
39. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
40. Komisi Nasional HAM;
41. Badan Kepegawaian Negara;
42. Komisi Aparatur Sipil Negara;
43. Badan Riset Inovasi Nasional;
44. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
45. Badan Siber Sandi Negara;
46. Badan Standardisasi Nasional;
47. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
48. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Pemerintah Kota Sabang;
4. Pemerintah Kota Subulussalam;
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. Pemerintah Kabupaten Langkat;
7. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Pemerintah Kabupaten Dairi;
9. Pemerintah Kota Medan;
10. Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
11. Pemerintah Kota Binjai;
12. Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
13. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Pemerintah Kabupaten Agam;
15. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
16. Pemeintah Kabupaten Solok;
17. Pemerintah Kabupaten Pasaman;
18. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
19. Pemerintah Kota Solok;

20. Pemerintah Kota Sawahlunto;
21. Pemerintah Kota Bukittinggi;
22. Pemerintah Kota Pariaman;
23. Pemerintah Kabupaten Oku;
24. Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
25. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
26. Pemerintah Kota Pagar Alam;
27. Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
28. Pemerintah Provinsi Riau;
29. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
30. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
31. Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
32. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
33. Pemerintah Kota Pekanbaru;
34. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
35. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
36. Pemerintah Kabupaten Bintan;
37. Pemerintah Kabupaten Natuna;
38. Pemerintah Kota Tanjung Pinang;
39. Pemerintah Kabupaten Bungo;
40. Pemerintah Kabupaten Kerinci;
41. Pemerintah Provinsi Bengkulu;
42. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
43. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
44. Pemerintah Kabupaten Kapahiang;
45. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung;
46. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
47. Pemerintah Kabupaten Bangka;
48. Pemerintah Kabupaten Belitung;
49. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
50. Pemerintah Kota Pangkalpinang;
51. Pemerintah Provinsi Lampung;
52. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
53. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
54. Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
55. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
56. Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
57. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;

58. Pemerintah Kota Bandar Lampung;
59. Pemerintah Kota Metro;
60. Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
61. Pemerintah Kabupaten Lebak;
62. Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
63. Pemerintah Kota Tangerang;
64. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
65. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
66. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
67. Pemerintah Kabupaten Karawang;
68. Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
69. Pemerintah Kabupaten Subang;
70. Pemerintah Kabupaten Bandung;
71. Pemerintah Kabupaten Ciamis;
72. Pemerintah Kabupaten Cirebon;
73. Pemerintah Kabupaten Sumedang;
74. Pemerintah Kota Bandung;
75. Pemerintah Kota Cimahi;
76. Pemerintah Kota Banjar;
77. Pemerintah Kota Depok;
78. Pemerintah Kota Bekasi;
79. Pemerintah Kota Bogor;
80. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
81. Pemerintah Kabupaten Purworejo;
82. Pemerintah Kabupaten Tegal;
83. Pemerintah Kabupaten Blora;
84. Pemerintah Kabupaten Semarang;
85. Pemerintah Kabupaten Magelang;
86. Pemerintah Kabupaten Boyolali;
87. Pemerintah Kabupaten Temanggung;
88. Pemerintah Kabupaten Pemasang;
89. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
90. Pemerintah Kabupaten Cilacap;
91. Pemerintah Kabupaten Demak;
92. Pemerintah Kabupaten Klaten;
93. Pemerintah Kabupaten Karangayar;
94. Pemerintah Kabupaten Pati;
95. Pemerintah Kabupaten Kendal;

96. Pemerintah Kabupaten Banyumas;
97. Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
98. Pemerintah Kabupaten Brebes;
99. Pemerintah Kota Pekalongan;
100. Pemerintah Kota Tegal;
101. Pemerintah Kota Semarang;
102. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
103. Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
104. Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
105. Pemerintah Kabupaten Madiun;
106. Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
107. Pemerintah Kabupaten Lamongan;
108. Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
109. Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
110. Pemerintah Kabupaten Jombang;
111. Pemerintah Kabupaten Kediri;
112. Pemerintah Kabupaten Jember;
113. Pemerintah Kabupaten Lumajang;
114. Pemerintah Kabupaten Gresik;
115. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
116. Pemerintah Kabupaten Situbondo;
117. Pemerintah Kota Batu;
118. Pemerintah Kota Probolinggo;
119. Pemerintah Kota Kediri;
120. Pemerintah Kota Madiun;
121. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta;
122. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
123. Pemerintah Kabupaten Sleman;
124. Pemerintah Kota Yogyakarta;
125. Pemerintah Provinsi Bali;
126. Pemerintah Kabupaten Karangasem;
127. Pemerintah Kabupaten Klungkung;
128. Pemerintah Kabupaten Badung;
129. Pemerintah Kabupaten Buleleng;
130. Pemerintah Kabupaten Tabanan;
131. Pemerintah Kabupaten Gianyar;
132. Pemerintah Kota Denpasar;
133. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

134. Pemerintah Kota Mataram;
135. Pemerintah Kabupaten Sikka;
136. Pemerintah Kabupaten Malaka;
137. Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
138. Pemerintah Kabupaten Ende;
139. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
140. Pemerintah Kabupaten Sambas;
141. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
142. Pemerintah Kabupaten Sanggau;
143. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
144. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
145. Pemerintah Kabupaten Banjar;
146. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
147. Pemerintah Kabupaten Tabalong;
148. Pemerintah Kabupaten Tapin;
149. Pemerintah Kota Banjarmasin;
150. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
151. Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
152. Pemerintah Kabupaten Sukamara;
153. Pemerintah Kabupaten Katingan;
154. Pemerintah Kabupaten Lamandau;
155. Pemerintah Kabupaten Kapuas;
156. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
157. Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
158. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
159. Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
160. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
161. Pemerintah Kabupaten Berau;
162. Pemerintah Kabupaten Paser;
163. Pemerintah Kota Samarinda;
164. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
165. Pemerintah Kabupaten Nunukan;
166. Pemerintah Kabupaten Malinau;
167. Pemerintah Provinsi Gorontalo;
168. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
169. Pemerintah Kabupaten Pangkajene;
170. Pemerintah Kabupaten Enrekang;
171. Pemerintah Kabupaten Bulukamba;

172. Pemerintah Kabupaten Barru;
173. Pemerintah Kabupaten Sinjai;
174. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
175. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
176. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
177. Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
178. Pemerintah Kabupaten Pinrang;
179. Pemerintah Kabupaten Gowa;
180. Pemerintah Kabupaten Luwu;
181. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
182. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
183. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
184. Pemerintah Kota Parepare;
185. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
186. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
187. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
188. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
189. Pemerintah Kabupaten Majene;
190. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
191. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
192. Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
193. Pemerintah Kabupaten Buton;
194. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
195. Pemerintah Kabupaten Sigi;
196. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
197. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
198. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.



Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Ichwan, S.H., M.H.

NIP.196506111985031001